



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **HERLI SALIM**
2. Jabatan : **DIREKTUR KAMPUS UPI DI SERANG**
3. NHK : **446395**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.525.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/64 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 1300 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 1390 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1965 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, WARISAN Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 211.500.000**

1. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR R2 Tahun 1986, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA HRV PRESTIGE Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, HONDA NF100SL/SEPEDA MOTOR RODA 2 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 12.900.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 69.835.522**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.819.235.522
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.819.235.522

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.